

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan<br>dikecualikan) | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                    | Jangka Waktu                                              |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                              |                                          | Dibuka                                                                              | Ditutup                            | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa<br>pengecualiannya)    | Permanen |
| I  | SEKRETARIAT KLH/SEKRETARIAT UTAMA BPLH                                       |                                          |                                                                                     |                                    |                                                           |          |
|    | Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa                                     |                                          |                                                                                     |                                    |                                                           |          |
| 1  | Dokumen penjatuhan disiplin pegawai                                          |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait | -        |
| 2  | Laporan Pajak/SPT Tahunan                                                    |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait |          |
| 3  | Seluruh berkas kepegawaian                                                   |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait |          |
|    |                                                                              |                                          |                                                                                     |                                    |                                                           |          |
|    | Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan<br>Nusa Tenggara                |                                          |                                                                                     |                                    |                                                           |          |
| 1  | Dokumen penjatuhan disiplin pegawai                                          |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait | -        |
| 2  | Laporan Pajak/SPT Tahunan                                                    |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait |          |
| 3  | Seluruh berkas kepegawaian                                                   |                                          | Dapat mengungkap<br>rahasia dan data<br>pribadi                                     | untuk perlindungan<br>data pribadi | sampai ada ijin atau persetujuan<br>pejabat/pihak terkait |          |

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                         |                                                                              |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Identitas pelapor pelanggaran lingkungan (whistle blower)                       |                                                                                                                                                                         | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi | Untuk melindungi keselamatan dan keamanan pelapor dari potensi intimidasi atau balasan. | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait                       |  |
|   | Pusat Pengembangan SDM Lingkungan Hidup                                         |                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                         |                                                                              |  |
| 1 | Proses penilaian pendidikan dan pelatihan (DUPAK)                               | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi       | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi                                             | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 2 | Proses penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi Penyuluh PNS | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi       | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi                                             | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                         |                                                                              |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                                             |                                                                              |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | <b>Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                     |                                             |                                                                              |  |
| 1 | Data Alamat dan Nara Hubung Pemegang Registrasi Laboratorium Lingkungan, LPJP AMDAL, LPJ Audit Lingkungan, Lembaga Verifikasi Ekolabel, Pemilik Produk yang teregistrasi produk Ramah Lingkungan (Ekolabel) | - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h                                                          | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
|   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                     |                                             |                                                                              |  |
|   | <b>Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                     |                                             |                                                                              |  |
| 1 | Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)                                                                                                                                  | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                             |                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 3 | Berkas Hukuman Disiplin                    | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                            |                                                                                                                                                                                |                                     |                                             |                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 5 | Data Mutasi Keluarga                       | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                               |                                                                                                                                                                                |                                     |                                             |                                                                              |  |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Berkas Baperjakat/Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi     | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 7 | Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) / SPT Tahunan / NPWP | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                |                                     |                                             |                                                                              |  |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8 | Data Pemberhentian Pegawai Tidak Atas Permintaan Sendiri | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 9 | Data Perselisihan/Sengketa Pegawai                       | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                             |                                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Seluruh Berkas Perseorangan PNS                                  | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
| 11 | Seluruh Berkas Perseorangan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi | Untuk kepentingan perlindungan data pribadi | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                             |                                                                              |  |
|    | Biro Umum                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                     |                                             |                                                                              |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Risalah Rapat Pimpinan Kementerian yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li> </ul> | Dapat mengungkapkan memorandum atau surat antar dan intra yang dirahasiakan | Untuk kepentingan perlindungan memorandum atau surat antar dan intra yang dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada putusan Komisi Informasi Pusat atau pengadilan yang menyatakan sebaliknya.</li> <li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li> </ul> |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   | <b>Biro Hukum dan Kerja Sama</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1 | Berkas tentang kasus/sengketa pidana yang masih dalam proses, baik kejahatan maupun pelanggaran (proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, berkas pembelaan dan bantuan hukum, telaah hukum dan opini hukum) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li> </ul> | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                     | Untuk kepentingan proses penegakan hukum                                               | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang                                                                                                                                                                             |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 2 | Berkas gugatan perdata yang masih dalam proses (memori gugatan sampai dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap) | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang |  |
| 3 | Berkas gugatan TUN yang masih dalam proses (memori gugatan sampai dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap)     | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang |  |
|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    |  |
|   | <b>Biro Perencanaan dan Keuangan</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                            |                                                           |                                                                           |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Dokumen permohonan pinjama luar negeri (Blue book)                              | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | Untuk kepentingan perlindungan ketahanan ekonomi nasional | Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku |  |
| 2 | Data pada Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional | Untuk kepentingan perlindungan ketahanan ekonomi nasional | Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                            |                                                           |                                                                           |  |
|   | <b>Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup</b>                               |                                                                                                                                                                         |                                            |                                                           |                                                                           |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Data Mentah Hasil Pengambilan dan Pengujian Contoh Uji Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> <p>- Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan</p> | - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Hasil Analisis Contoh Uji Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi dan Sertifikat Hasil Uji (Pelayanan Jasa) | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> <p>- Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan</p> | - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Instruksi Kerja Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li><li>- Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pemenuhan persyaratan dari pelanggan Laboratorium sebagai bagian dari kontrak kerja. Umumnya dipersyaratkan untuk safety bagi pekerjaan di lokasi yang rawan bahaya.</li></ul> |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Identitas Pengguna Layanan Jasa Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li><li>- UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat mengungkap data rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</li><li>- Dapat melanggar prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan data</li><li>- Menjaga prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Laboratorium Lingkungan oleh tim pembinaan Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.</li></ul> |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | <p>Identitas Pribadi Personel Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi dan personil administrasi</p> | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</p> <p>- UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>- Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan</p> | <p>- Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab</p> <p>- Dapat melanggar prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan</p> | <p>- Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan data pribadi</p> <p>- Menjaga prinsip kerahasiaan laboratorium lingkungan</p> | <p>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</p> |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                           |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Data Mentah Hasil Pengukuran dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Penyelenggara Uji Profisiensi, Penyelenggara Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | Data Mentah Hasil Pengujian Bahan Objek Uji Profisiensi Laboratorium Peserta Uji Profisiensi | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pengolahan data Uji Profisiensi oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Laboratorium Peserta oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.</li></ul> |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8 | Data Mentah Hasil Pengukuran dan Kalibrasi Artefak Laboratorium Peserta Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li><li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pengolahan data Uji Banding Lab Kalibrasi (UBLK) oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.</li><li>- Dapat dibuka dalam rangka pembinaan Peserta UBLK oleh Penyelenggara Uji Profisiensi dalam hal ini Pusarpedal, dengan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas dan kerahasiaan informasi.</li></ul> |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | Informasi terkait pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan dan identitas pengadu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</li> </ul> | - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan | - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan</li> <li>- Dapat dibuka dalam rangka tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.</li> </ul> |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | <b>PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION SUMATERA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | <b>PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION JAWA</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | <b>PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION KALIMANTAN</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1 | LPJ Bendahara (bulanan)                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                                      | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | Laporan Keuangan Triwulan                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                                      | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait                                                                                                                                                                                        |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                           |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| 3 | Laporan Keuangan Semester                                 |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
| 4 | Laporan Keuangan Tahunan                                  |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
|   |                                                           |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |
|   | <b>PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION SULAWESI/MALUKU</b>       |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |
| 1 | Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai                          | Berdasarkan prinsip pengecualian terbatas sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | untuk perlindungan data pribadi dan dapat di akses jika dibutuhkan dengan di sensor data pribadi | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
| 2 | Laporan Audit Internal                                    |                                                                                    | Dapat mengganggu proses Pengawasan                                                               | Dapat dibuka jika proses audit sudah selesai                                            | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
| 3 | Dokumen penjatuhan disiplin pegawai                       |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait | - |
| 4 | Laporan Pajak/SPT Tahunan                                 |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
| 5 | Seluruh berkas kepegawaian                                |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | untuk perlindungan data pribadi                                                         | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
| 6 | Identitas pelapor pelanggaran lingkungan (whistle blower) |                                                                                    | Dapat mengungkap rahasia dan data pribadi                                                        | Untuk melindungi keselamatan dan keamanan pelapor dari potensi intimidasi atau balasan. | sampai ada ijin atau persetujuan pejabat/pihak terkait |   |
|   |                                                           |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |
|   | <b>PUSAT PENGENDALIAN EKOREGION PAPUA</b>                 |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |
|   |                                                           |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                         |                                                        |   |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)               | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                         |                                                                                                                  | Jangka Waktu                                        |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dibuka                                                                                                                      | Ditutup                                                                                                          | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa pengecualiannya) | Permanen |
| I  | DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                     |          |
| 1  | Peta informasi geospasial lingkup Kementerian LH/BPLH format SHP dan format sejenisnya. | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan i.<br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2, 3.<br>- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68.<br>- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 239.K/TUN/KI/2017 tanggal 13 Juni 2017. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang. | -        |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih dalam proses dan telah dinilai oleh Pemerintah Pusat/Kementerian LH format softcopy.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b.</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3</li> <li>- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21,26,46,62, dan 68.</li> </ul>   | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang</li> <li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li> </ul> | - |
| 3 | Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diperiksa oleh Pemerintah Pusat/Kementerian LHK format softcopy | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3</li> <li>- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21, 26, 46, 62, dan 68.</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang</li> <li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li> </ul> |   |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang dinilai/ diperiksa oleh KLHK format softcopy | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3</li> <li>- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 21,26,46,62, dan 68</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang</li> <li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li> </ul>  |  |
| 5 | Dokumen Audit Lingkungan Hidup                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3</li> </ul>                                                                                       | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                                 | Untuk kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.</li> <li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li> </ul> |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                           |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Data proses perizinan bidang Tata Lingkungan (yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai, diberikan izin/ditolak) | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b</li><li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1,2 dan Pasal 65 ayat 1,2 dan Pasal 66 ayat 1,2,3</li></ul> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Untuk kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"><li>- Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.</li><li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan yang berlaku</li></ul> |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum<br>Pengecualian Informasi                                           | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                                                                                                     |                                        | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                                 | Dibuka                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ditutup                                | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa pengecualiannya)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Permanen                                                                                                                                                                                                                      |
| I  | DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. | Nilai Kontrak dan RAB Pembangunan IPAL                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) | Informasi yang apabila dibuka :<br>1. dapat mengungkap isi rancangan peraturan, rancangan keputusan, atau rancangan kebijakan yang sedang dalam proses penyusunan, sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap persaingan sehat, keamanan informasi strategis, atau kepentingan nasional | 1. Keterbatasan Pengawasan oleh Publik | Nilai Kontrak dan RAB Pembangunan IPAL dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sementara waktu, hingga proses pengadaan atau pembangunan selesai secara penuh, dan/atau apabila dibuka berpotensi menimbulkan risiko terhadap persaingan sehat, keamanan informasi strategis, atau kepentingan nasional. | UU KIP memperbolehkan informasi dikecualikan hanya jika membuka informasi tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap kepentingan yang dilindungi, misalnya keamanan negara, strategi pengadaan, atau posisi tawar pemerintah. |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 2. dapat mengungkap dokumen yang bersifat internal, atau yang belum final dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. | 2. Melemahnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah                                                                               | Melalui mekanisme permohonan informasi publik secara sah dan dapat diserahkan sebagian jika sudah tidak menimbulkan risiko sebagaimana diatur oleh peraturan. |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      | 3. Terbatasnya Partisipasi Masyarakat                                                                                                 |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      | 4. Tertutupnya Pembelajaran Publik dan Institusi Lain                                                                                 |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      | Publik tetap dapat mengakses informasi umum: seperti total nilai proyek, sumber pembiayaan, tujuan pembangunan, dan tahapan kegiatan. |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      | Informasi rinci yang strategis (misal: harga satuan, rincian RAB) bisa dikecualikan sementara selama proyek berjalan.                 |                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Setelah proyek selesai, informasi dapat dibuka untuk evaluasi publik dan pertanggungjawaban. |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                           | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Dibuka                                                                              | Ditutup                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa pengecualiannya)                                                                                                                                                                                                              | Permanen |
| I  | DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|    | Direktorat Pengelolaan Limbah B3 Dan Non B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1  | Baseline Timbulan Sampah pada Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengurangan Sampah Oleh Produsen sebagaimana diatur dalam Permen LHK P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang meliputi:<br>1. Data produk, kemasan produk, dan wadah yang meliputi varian, sub varian, ukuran, jenis bahan.<br>2. Jumlah produk, kemasan produk, dan wadah yang diproduksi, dipasarkan, | 1. Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>2. Pasal 6 ayat 3 Poin b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>3. Pasal 3 UU 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat         | 1. Merupakan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat<br>2. Merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang dan/atau Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.<br><br>Informasi Dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dapat disampaikan ke publik dalam bentuk ringkasan |          |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |                                         |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | dan ditarik kembali<br>(product retour) |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Dokumen tertulis berupa:<br>- Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi<br>- Berita Acara Verifikasi Lapangan/Pembahasan Teknis<br>- Berita Acara Pemantauan Kinerja antara Direktorat PLB3 dengan pihak terkait (instansi Pemerintah dan perusahaan) | - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2, dan pasal 65 ayat 1, 2, 3<br><br>- Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d, data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian | - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.<br><br>- Menghambat tahapan proses penelaahan dan penyelesaian permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 | - Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.<br><br>- Menjaga kelancaran tahapan proses penyelesaian permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Dokumen Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3, Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, Rekomendasi Impor Limbah nonB3, Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurufb</li> <li>- UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 59 ayat 1, 2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan pasal 66 ayat 1,2,3</li> </ul> | <p>Sebagai salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Dokumen Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3, Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, Rekomendasi Impor Limbah nonB3, Notifikasi Ekspor Limbah B3 bersifat konkret, individual dan final sehingga tidak ditujukan untuk umum.</p> <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</p> | <p>Untuk penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keputusan Tata Usaha Negara Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</p> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Data pelaporan Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3 selain rekap data Limbah B3 dan non-B3 yang bersifat agregat pada suatu wilayah dan/atau satuan waktu | - UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 huruf o<br>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 hurufb<br>- UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 59 ayat 1, 2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan pasal 66 ayat 1,2,3 | Dapat menimbulkan persepsi dan penilaian lain secara sepihak terhadap informasi yang belum final dalam menentukan ketaatan dan/atau ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Untuk mencegah timbulnya persepsi dan penilaian lain secara sepihak terhadap informasi yang belum finaldanmenentukan ketaatan dan/atau ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | Data hasil pemantauan dan/atau uji laboratorium terkait dengan penataan Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lampiran II PermenLHK No. 23 tahun 2020</li><li>- Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 (ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 2018) pada bagian 4.2</li><li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b</li><li>- UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 59 ayat 1, 2 dan pasal 65 ayat 1, 2 dan pasal 66 ayat 1,2,3</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dapat mengungkap informasi pada laboratorium lingkungan yang bersifat rahasia.</li><li>- Dapat mengganggu kepen tingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk menjaga informasi pada laboratorium lingkungan yang bersifat rahasia</li><li>- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</li></ul> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/ atau adanya keputusan dari pengadilan dan/atau pernyataan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   | Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan NonB3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b</li> <li>- UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9</li> <li>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf d</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</li> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul> | Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/ atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup. Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan | Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                 |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Surat Persetujuan Dokumen RPFLH | <p>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b</p> <p>- UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9</p> <p>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf d</p> | <p>- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</p> | <p>- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</p> <p>- Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</p> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan. | Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Laporan Akhir Pelaksanaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dan/atau Non B3 | <div>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b</div> <div>- UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9</div> | <div>- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</div> <div>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat</div> | <div>- Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</div> <div>- Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup.</div> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan. | Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | SK Status Telah Selesai Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (SSPLT) | <p>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b</p> <p>- UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9</p> <p>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK Pasal 7 ayat (2) huruf d</p> | <p>- Dapat mengganggu proses penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan dan/atau kasus pelanggaran lingkungan hidup.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.</p> | Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 merupakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan dan/ atau kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup. Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan. | Dapat dibuka apabila adanya permintaan dari pengadilan untuk keperluan tertentu |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Limbah B3 Kedaruratan Skala Industri | <p>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK</p> <p>- Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3</p> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi terkait bahan baku yang digunakan dalam proses produksi | Hak pelaku usaha atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan | Permanen dan dapat dibuka jika ada kepentingan-kepentingan khusus yang menyebabkan data informasi diperlukan |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Surat Hasil Review Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Limbah B3 | <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>- PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK</li><li>- Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3</li></ul> | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena mengandung informasi terkait bahan baku yang digunakan dalam proses produksi | Hak pelaku usaha atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan | Permanen dan dapat dibuka jika ada kepentingan-kepentingan khusus yang menyebabkan data informasi diperlukan |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Laporan Akhir Penanggulangan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 serta Kegiatan Penghentian Kegiatan dan/atau Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK</li> <li>- Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3</li> </ul> | Dapat berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas pelaksanaan penanganan kedaruratan dan/atau lahan terkontaminasi Limbah B3 serta perlindungan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan data kedaruratan dan lahan terkontaminasi Limbah B3 | <p>Memiliki data internal/identitas penanggung jawab pelaku usaha dan/atau data penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 serta kegiatan penutupan fasilitas pengelolaan Limbah B3.</p> <p>Mencakup data dan informasi terkait penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 serta kegiatan penutupan fasilitas pengelolaan Limbah B3.</p> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan. | Permanen dan dapat dibuka jika ada kepentingan-kepentingan khusus yang menyebabkan data informasi diperlukan |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Surat Keterangan Telaah Selesai Dilaksanakannya Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 | <p>- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Permen LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KLHK</p> <p>- Permen LHK No. P.74/MENLHK/SETJEN/KU M.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3</p> | Dapat berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas pelaksanaan penanganan kedaruratan dan/atau lahan terkontaminasi Limbah B3 serta perlindungan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan data kedaruratan dan lahan terkontaminasi Limbah B3 | <p>Memiliki data internal/identitas penanggung jawab pelaku usaha dan/atau data penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 serta kegiatan penutupan fasilitas pengelolaan Limbah B3.</p> <p>Mencakup data dan informasi terkait penanggulangan kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 serta kegiatan penutupan fasilitas pengelolaan Limbah B3.</p> | Dapat dibuka dalam rangka penegakan hukum oleh pihak berwenang dan/atau adanya keputusan dari pengadilan. | Permanen dan dapat dibuka jika ada kepentingan-kepentingan khusus yang menyebabkan data informasi diperlukan |
| 9. | Sistem Informasi Mengenai Bank Sampah (SIMBA)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                              |

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)       | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                               | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian<br>konsekuensi/pertimbangannya) |                                                                                                                                                                                                          | Jangka Waktu                                           |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                 |                                                                        | Dibuka                                                                                 | Ditutup                                                                                                                                                                                                  | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa<br>pengecualiannya) | Permanen |
| I  | DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN TATA KELOLA NILAI EKONOMI KARBON |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |          |
|    | Direktorat TKPNEK                                                               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |          |
| 1  | Perjanjian Pengakuan Bersama                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |                                                                                        | Isi perjanjian yang tidak boleh di ketahui oleh banyak pihak.                                                                                                                                            |                                                        | Permanen |
| 2  | Data terkait pungutan PNBK kepada pihak yg blm membayar                         |                                                                        |                                                                                        | Data-data penunggak PNBK yg masih blm membayar                                                                                                                                                           |                                                        | Permanen |
|    |                                                                                 |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |          |
|    | Direktorat Mobilisasi Sumber Daya PPI                                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |          |
| 1  | Kertas Posisi Perundingan Perubahan Iklim                                       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |                                                                                        | Substansi kertas berisi kepentingan Indonesia pada perundingan multilateral, dimana terdapat pihak yang berseberangan atau tidak selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia terkait perubahan iklim. |                                                        | Permanen |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |  |  |                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Kebocoran posisi<br>Indonesia<br>dikhawatirkan<br>dapat mengganggu<br>ketahanan /<br>keamanan terhadap<br>pembangunan<br>ekonomi dan<br>sumber daya alam |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)                   | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                                                            |                                                                                                        | Jangka Waktu                                                                 |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dibuka                                                                                                                                                                                                                         | Ditutup                                                                                                | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa pengecualiannya)                          | Permanen |
| I  | DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                              |          |
| 1  | Data Sanksi Administrasi mulai dari Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sanksi Administrasi | - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a "Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum" huruf b "Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat". | - Apabila surat keputusan sanksi administrasi diberikan kepada pihak yang tidak tercantum di dalam Surat Keputusan Sanksi, dapat mengganggu proses penegakan sanksi administrasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. | - Untuk perlindungan penegakan sanksi administrasi dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |          |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                     |          |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  | <p>- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"</p> <p>Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Bersifat konkret artinya artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan ketentuan di atas, KTUN bersifat individual, sehingga sanksi administratif hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam KTUN tersebut, tidak ditujukan kepada umum.</p> | <p>- Surat Keputusan Sanksi Administrasi sebagai salah satu KTUN harus bersifat konkret, individual dan final karena merupakan penetapan tertulis dari pejabat berwenang yang isinya secara spesifik ditujukan kepada pihak tertentu saja, bukan seperti undang-undang yang bersifat umum dan terbuka untuk publik.</p> <p>- Apabila Surat Keputusan Sanksi Administrasi diberikan kepada pihak yang tidak tercantum di dalam SK, maka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keputusan Tata Usaha Negara</p> | <p>- Untuk penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keputusan Tata Usaha Negara</p> | <p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya.</p> | <p>-</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>- PermenLHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d</p> <p>-Pasal 28 PermenLHK No. P.22 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, "Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu."</p> |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Data penanganan pengaduan dan pengawasan penataan badan usaha dan/atau kegiatan | <p>- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a "Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum" huruf b "Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali: b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat".</p> <p>- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Bersifat konkret artinya artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan Bersifat individual artinya tidak</p> | <p>Apabila data penanganan pengaduan diberikan kepada pihak yang tidak tercantum, maka dapat diketahui pihak pengadu yang beresiko akan dikenakan ancaman dari pihak yang diadukan, informasi terkait pengadu harus dirahasiakan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan bebas tanpa rasa takut dan terlindungi dari intimidasi pihak luar.</p> <p>Berita Acara Pengawasan terhadap suatu perusahaan memuat data-data perusahaan, temuan hasil pengawasan, dan ketaatan perusahaan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila Berita Acara tersebut diketahui isinya oleh perusahaan saingan, besar kemungkinan</p> | <p>- Untuk penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Keputusan Tata Usaha Negara</p> <p>-Untuk perlindungan data pribadi masyarakat selaku pengadu</p> <p>-Untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat</p> | Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkapkan rahasianya. |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan ketentuan di atas, KTUN bersifat individual, sehingga sanksi administratif hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum di dalam KTUN tersebut, tidak ditujukan kepada umum.</p> <p>- PermenLHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d</p> <p>-Pasal 28 PermenLHK No. P.22 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, "Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu."</p> | <p>data dan informasi dalam Berita Acara tersebut akan disalahgunakan untuk menjatuhkan perusahaan tersebut.</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                                                                                     |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Berkas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui maupun di luar pengadilan yang masih dalam proses | <div>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d</div>                                                                              | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |  |
| 3 | Berkas yang berkaitan dengan pencegahan, penyelidikan dan pengamanan lingkungan yang bersifat intelejen      | <div>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 Pasal 66 ayat 3</div> <div>- Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang                                                  |  |
| 4 | Berkas yang berkaitan administrasi penyidikan (Mindik) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup         | <div>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- Permen LHK No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) huruf d</div>                                                                              | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |  |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

| No | Informasi Publik<br>(berisikan informasi tertentu yang akan dikecualikan)                                                                                                                      | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) |                                          | Jangka Waktu                                        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | Dibuka                                                                              | Ditutup                                  | Tidak Permanen<br>(disebutkan masa pengecualiannya) | Permanen |
| I  | INSPEKTORAT UTAMA                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                          |                                                     |          |
| 1  | Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                             | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang  |          |
| 2  | Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)                                                                                                       | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a<br><br>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3 | Dapat menghambat proses penegakan hukum                                             | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang  |          |

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN 2025**

|   |                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 3 | Pemeriksaan Khusus tentang Penyelesaian Kasus-Kasus yang Merugikan Negara | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang |  |
| 4 | Kertas Kerja Pemeriksaan, LHP Khusus                                      | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang |  |
| 5 | Hasil Analisis Laporan Pengawasan yang Berkaitan Dengan Sanksi            | <div>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</div> <div>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 59 ayat 1, 2 dan Pasal 65 ayat 1, 2 dan Pasal 66 ayat 1, 2 ,3</div> | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Untuk kepentingan proses penegakan hukum | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang |  |